

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perusahaan pada awalnya didirikan dengan tujuan utama mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Lewat laporan keuangan, perusahaan menyajikan serta melaporkan indikator keberhasilan ekonomi untuk memenuhi keinginan *stakeholders* akan pengembangan perusahaan ke arah yang lebih baik (Safitri dan Saifudin, 2019). Laporan keuangan tersebut tentunya hanya berisi tentang keberhasilan serta perkembangan perusahaan dari sisi ekonomi saja, tanpa mengungkapkan dampak secara sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi yang dilakukan perusahaan tersebut. Sebagian perusahaan menganggap bahwa sudah cukup jika perusahaan hanya menyediakan produk yang memuaskan kebutuhan konsumen (Safitri dan Gunawan, 2019). Tetapi sekarang masyarakat semakin tersadar bahwa tidak cukup jika hanya itu saja, perusahaan juga harus memberikan perhatiannya terhadap dampak dari kegiatan ekonominya tersebut. Tidak hanya masyarakat, tetapi pemangku kepentingan lain dalam perusahaan juga menyadari bahwa tidak hanya neraca serta laporan keuangan lainnya yang penting, tetapi perusahaan juga harus memiliki tanggung jawab sosial untuk membantu memecahkan masalah sosial yang mungkin terjadi yang terkait dengan di mana perusahaan tersebut berada (Khafid dan Mulyaningsih, 2015).

Berdasarkan kesadaran dari berbagai pihak itulah laporan keberlanjutan menjadi laporan yang belakangan ini menjadi isu utama dalam lingkungan perusahaan (Aniktia dan Muhammad, 2015). Laporan keberlanjutan merupakan laporan yang menjadi alat bagi perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dalam mengkomunikasikan kinerjanya dalam 3 aspek yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan (*Sustainability Finance* OJK, 2017). Laporan keberlanjutan merupakan sarana bagi perusahaan untuk mengukur dan mengungkapkan kinerja dari organisasinya dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang dipertanggungjawabkan kepada pemangku yang berkepentingan baik dari dalam maupun luar perusahaan (Safitri dan Saifudin, 2019).

Pengungkapan laporan keberlanjutan merupakan bentuk sebuah komitmen dari perusahaan dalam mempublikasikan laporan keberlanjutan. Selain itu, pengungkapan laporan keberlanjutan yang lebih komprehensif menjadi salah satu sarana yang mendukung untuk pengambilan keputusan yang semakin hari semakin disadari oleh pemimpin di dalam perusahaan. Pengungkapan laporan keberlanjutan berpedoman pada *Global Reporting Initiative* (GRI) yang bertempat di Belanda. Melalui laporan keberlanjutan ini semua pihak seperti pemerintah, organisasi lingkungan, karyawan, masyarakat, dan berbagai pihak lain dapat langsung menilai kinerja perusahaan. Bagi kreditor maupun investor tentunya laporan keberlanjutan dapat membantu untuk mendeteksi kerugian yang mungkin terjadi jika perusahaan lalai dalam tanggung jawabnya terhadap lingkungan dan sosial (Khafid dan Mulyaningsih, 2015).

Sesuai dengan *National Center for Sustainability Reporting* atau NCSR (2014) terdapat 60 perusahaan yang membuat laporan keberlanjutan (Aniktia dan Khafid, 2015). Pengungkapan laporan keberlanjutan di Indonesia masih bersifat sukarela dan belum ada aturan yang mewajibkannya. Tetapi terdapat peningkatan yang berarti bahwa perusahaan semakin menyadari bahwa penting untuk mengungkapkan laporan mengenai aktivitas perusahaan yang diimbangi dengan tanggungjawab terhadap dampak ekonomi, lingkungan dan sosial.

Laporan keberlanjutan merupakan laporan yang dipublikasikan perusahaan yang di dalamnya terdapat dampak ekonomi dan informasi mengenai *Environmental, Sosial dan Governance* (ESG). Terkait dengan lingkungan untuk mengetahui seberapa besar tanggung jawab dan kepedulian perusahaan terhadap alam di sekitarnya. Sedangkan terkait dengan dampak sosial untuk mengetahui apakah perusahaan membangun hubungan yang positif dengan para pekerja, pelanggan, pemasok, dan para masyarakat di luar perusahaan. Demikian halnya terkait dengan tata kelola di lihat dari kepemilikan perusahaan, kontrol dari dalam perusahaan dan hak investor. Dengan demikian tujuan utama perusahaan tidak lagi hanya terbatas pada mencari keuntungan (*profit*) tetapi juga kepada masyarakat (*people*) dan bumi (*planet*) yang dikenal dengan *Tripple-P Bottom Line* yang kemudian menjadi konsep yang berkembang dan disebut dengan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*).

Pemangku kepentingan merupakan suatu kelompok maupun seseorang yang memiliki kepentingan dalam suatu organisasi tertentu (Rudyanto dan Siregar, 2016). Setiap klasifikasi industri memiliki pemangku kepentingan utama yang berbeda-beda. Menurut Hamudiana dan Achmad (2017), pemangku kepentingan merujuk pada konsumen, dan pemegang saham serta Lu dan Abeysekera (2014) mengatakan bahwa salah satu pemangku kepentingan ialah pemerintah. Tekanan pemangku kepentingan yang berasal dari ketiga kelompok ini menuntut perusahaan untuk melaksanakan dan mengkomunikasikan tanggung jawab sosialnya yang tidak hanya diwujudkan berupa sekedar laporan tetapi laporan yang berkualitas, komprehensif, dan lengkap yaitu dalam laporan keberlanjutan.

Tekanan yang berasal dari konsumen mendorong perusahaan untuk mengungkapkan laporan keberlanjutan untuk meningkatkan *image* yang akan mempengaruhi penjualan. Konsumen tentu akan lebih berminat dengan perusahaan yang menghasilkan produk dengan kualitas bagus dengan harga yang terjangkau namun tetap memperhatikan dampak dari kegiatan produksi tersebut. Oleh karena itu perusahaan cenderung akan berusaha untuk menarik hati konsumen dengan mengungkapkan laporan keberlanjutan agar perusahaan semakin memiliki citra baik di mata konsumen. Rudyanto dan Siregar (2016) telah melakukan penelitian mengenai pengaruh tekanan konsumen terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan dan memperoleh hasil terdapat pengaruh positif antara tekanan konsumen dan pengungkapan laporan keberlanjutan. Hal tersebut dikarenakan konsumen di Indonesia memperhatikan produk yang mereka gunakan, apakah terbuat dari bahan yang ramah lingkungan, tidak menggunakan pekerja paksa dan pertimbangan lainnya yang berkisar tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hamudiana dan Ahmad (2017) memberikan hasil yang sebaliknya yaitu tekanan konsumen tidak mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.

Pemerintah merupakan badan yang bertindak sebagai regulator yang dipercaya oleh masyarakat. Pemerintah yang memiliki saham dalam suatu perusahaan terutama dalam jumlah yang besar tentunya akan memiliki hak untuk mengatur kebijakan yang harus dilakukan oleh manajemen agar sesuai dengan

kepentingan pemerintah. Hak tersebut salah satunya ialah mendorong perusahaan untuk mengungkapkan lebih banyak informasi bagi pemerintah tidak hanya terbatas pada laporan keuangan saja. Hal tersebut diatur dalam UU PT. No. 40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa pengungkapan yang lebih luas merupakan suatu wujud dari akuntabilitas atas pengelolaan perusahaan (Ayub, 2018). Pengungkapan yang lebih besar tersebut merupakan pengungkapan dalam laporan keberlanjutan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hartanto dan Purwatiningsih (2014), tekanan dari pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Penelitian ini bertentangan dengan yang dilakukan oleh Abeysekera dan Lu (2014). Berdasarkan Abeysekera dan Lu (2014), tekanan dari pemerintah berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan yang disebabkan oleh peran pemerintah sebagai regulator yang dianggap dapat mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara lebih luas dan transparan.

Perusahaan yang memiliki citra yang baik tentunya akan lebih menarik perhatian para pemegang saham. Menurut Rudyanto dan Siregar (2016) perusahaan yang memiliki tingkat penyebaran saham rendah cenderung memiliki laporan tanggung jawab sosial yang lebih buruk daripada perusahaan dengan tingkat penyebaran saham lebih tinggi. Dengan demikian tekanan yang diperoleh dari pemegang saham pun akan berbeda, sehingga perusahaan dengan tingkat penyebaran saham tinggi akan lebih mendapat banyak tekanan dari pemegang saham untuk memaksimalkan tindakan ekonomi, sosial, dan lingkungan guna pengambilan keputusan (Hamudiana dan Achmad, 2017).

Pengungkapan laporan keberlanjutan tidak hanya dituntut oleh pemangku kepentingan saja, melainkan juga datang dari dalam perusahaan yaitu tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan menurut *Finance Committee on Corporate Governance* adalah suatu proses serta struktur yang dipakai oleh perusahaan dalam mengarahkan dan mengelola bisnisnya serta berbagai aktivitas perusahaan dalam upaya peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan (Aniktia dan Khafid, 2015). Jika pengawas perusahaan memberikan tekanan yang cukup besar bagi perusahaan, maka perusahaan cenderung akan menghasilkan laporan

keberlanjutan yang berkualitas pula. Tekanan yang berasal dari pengawas perusahaan akan dirasakan jika perusahaan tersebut memiliki tata kelola yang baik (Rudyanto dan Siregar, 2016). Dalam menjalankan mekanisme tata kelola yang baik, tentunya perusahaan tidak saja terfokus pada tujuan dari segi ekonomi tetapi juga memperhatikan keseimbangan antara kepentingan *stakeholders*, dan ketaatan terhadap berbagai aturan dan norma yang telah dibuat untuk kegiatan yang nantinya akan dilakukan. Tata kelola perusahaan tersebut terdiri dari dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit.

Dewan komisaris yang menjalankan fungsi serta tanggung jawab dengan baik dan efektif sangat mempengaruhi pelaksanaan tata kelola perusahaan. Dewan komisaris merupakan perwakilan dari para pemangku kepentingan yang memiliki wewenang untuk memberi pengawasan atas segala kegiatan perusahaan yang dilaksanakan oleh dewan direksi. Dewan komisaris yang menjalankan tugasnya dengan optimal akan cenderung menuntut perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosialnya dalam bentuk laporan keberlanjutan yang nantinya akan digunakan untuk pengambilan keputusan jangka panjang dan menghindarkan perusahaan dari berbagai resiko yang mungkin terjadi. Penelitian mengenai pengaruh dewan komisaris terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan telah dilakukan oleh Jaya, Kurniawan, dan Wahyuni (2019) dan memperoleh hasil dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Namun hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Safitri dan Saifudin (2019), yang memperoleh hasil dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Hal tersebut disebabkan dalam penelitian tersebut dewan komisaris belum menjalankan tugasnya secara maksimal.

Dewan direksi merupakan organ di dalam perusahaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab penuh untuk mengelola perusahaan (Khafid dan Mulyaningsih, 2015). Dewan direksi yang memiliki kinerja yang baik akan mencerminkan pengawasan aktivitas perusahaan yang lebih efektif dan di nilai mampu untuk mewujudkan tata kelola yang baik bagi perusahaan. Perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik lewat koordinasi dewan direksi cenderung akan berusaha untuk mengungkapkan semua informasi kepada para pemangku kepentingan termasuk

dalam bentuk laporan keberlanjutan. Penelitian mengenai pengaruh dewan direksi terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan sebelumnya telah dilakukan oleh Idah (2013) yang memperoleh hasil dewan direksi memiliki peran positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan yang diwujudkan melalui frekuensi rapat antar anggota dewan direksi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hasanah, Syam dan Jati (2017) memperoleh hasil sebaliknya, dewan direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan perusahaan.

Komite audit merupakan salah satu dewan pengawasan dalam tata kelola perusahaan. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris yang diberi tugas untuk menjalankan secara efektif pengawasan atas laporan keuangan, pengendalian internal, serta pelaksanaan dari tata kelola perusahaan. Komite audit dibentuk untuk mengkomunikasikan segala sesuatu berkaitan dengan perusahaan kepada dewan komisaris, manajemen, auditor eksternal, dan auditor internal (Khafid dan Mulyaningsih, 2015). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hasanah, Syam dan Jati (2017), diperoleh hasil bahwa komite audit tidak punya pengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Hasil tersebut berbanding terbalik dengan penelitian terbaru yang dilakukan oleh Safitri dan Saifudin (2019). Dalam penelitian tersebut komite audit punya pengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Komite audit terbukti dapat mendorong manajemen dalam perusahaan untuk melakukan pengungkapan laporan keberlanjutan melalui jumlah pertemuan yang dilakukan.

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh dari tekanan pemangku kepentingan yang dipandang dari industri konsumen, pemerintah dan pemegang saham serta pengaruh dari tata kelola perusahaan yang diukur dari efektifitas dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan periode 2015-2018. Sampel dalam penelitian ini menggunakan semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018. Tahun tersebut dipilih karena sejak tahun 2013 GRI telah menerapkan standar pengungkapan yang baru yaitu GRI G4. Standar tersebut dinilai lebih baik dari standar sebelumnya karena menambahkan *sustainability development goals* (SDGs) sebagai dasar dari pengungkapan tiap komponen yang ada (Sara,2019). Penelitian ini

menggunakan perusahaan-perusahaan yang telah melaporkan laporan keberlanjutan yang terpisah dari laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan serta kepada pemangku kepentingan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah untuk penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Apakah tekanan konsumen sebagai pemangku kepentingan berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan Perusahaan-Perusahaan di Indonesia periode 2015-2018?
2. Apakah tekanan pemerintah sebagai pemangku kepentingan berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan Perusahaan-Perusahaan di Indonesia periode 2015-2018?
3. Apakah tekanan pemegang saham sebagai pemangku kepentingan berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan Perusahaan-Perusahaan di Indonesia periode 2015-2018?
4. Apakah dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan Perusahaan-Perusahaan di Indonesia periode 2015-2018?
5. Apakah dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan Perusahaan-Perusahaan di Indonesia periode 2015-2018?
6. Apakah komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan Perusahaan-Perusahaan di Indonesia periode 2015-2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji dan menganalisis apakah tekanan pemangku kepentingan yang meliputi konsumen, pemerintah dan pemegang saham berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.

2. Menguji dan menganalisis apakah tata kelola perusahaan yang meliputi dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ada, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya serta memperkaya penelitian mengenai pengungkapan laporan keberlanjutan. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan pemahaman akademis kepada pembaca.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memicu banyak perusahaan untuk melakukan pelaporan serta menyajikan tidak hanya terbatas pada laporan keuangan saja, melainkan laporan yang mencakup semua aspek yaitu laporan keberlanjutan. Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi dasar pengambilan keputusan dalam berinvestasi terutama pada perusahaan yang mengungkapkan laporan keberlanjutan sebagai sumber informasi non-keuangan.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan model penelitian.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai desain penelitian, identifikasi, definisi operasional dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel dan teknik penyampelan dan analisis data.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, hasil analisis data, dan pembahasan.

BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Bab ini berisi mengenai simpulan, keterbatasan dan saran dari penelitian ini.